

Relasi Agama dan Negara: Kajian Teologi Politik Indonesia

Alfina Nur Lutfiah¹, Dadan Firdaus², Farid Nur Fauzan Naufal³, Nisfah Nurfatihah⁴,
Sabda Maulana⁵

Sastra Inggris, Fakultas, Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati,
Bandung, Indonesia ^{1,2,3,4,5}

Email: alfinanurlutfiah1@gmail.com, dadanfirdaus@uinsgd.ac.id, faridnauval05@gmail.com,
nispah.nurpatihah@gmail.com, sabdamaulana221@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima	01-07-2025
Disetujui	10-07-2025
Diterbitkan	12-07-2025

ABSTRACT

Political theology is an academic approach that explores the relationship between theological thought religious views on God, humanity, and life and the political, social, and economic order. This field of study goes beyond the direct involvement of religion in politics, examining how divine values shape understandings of power, justice, and community life. This article specifically discusses the definition and scope of political theology in the Indonesian context—a nation that integrates religious principles with the national ideology of Pancasila. In Indonesia's religiously and culturally plural society, political theology has emerged as a dynamic field of dialogue between religious teachings, democratic governance, and contemporary social realities. The article outlines how political theology can serve as both a reflective and critical tool for analyzing public policy, power distribution, and political morality. By elaborating on the core concepts of political theology and linking them to Indonesia's sociopolitical landscape, this article aims to broaden the academic understanding of religion's role in public life in a pluralistic nation.

Keywords : *Political theology, religion and state, Pancasila, pluralism, public ethics, Indonesia*

ABSTRAK

Teologi politik merupakan suatu pendekatan kajian yang mengeksplorasi hubungan antara pemikiran teologis—yakni pandangan keagamaan tentang Tuhan, manusia, dan kehidupan—dengan tatanan politik, sosial, dan ekonomi. Kajian ini tidak hanya membahas keterlibatan agama dalam politik praktis, tetapi juga menganalisis bagaimana nilai-nilai ketuhanan membentuk pemahaman tentang kekuasaan, keadilan, dan kehidupan bermasyarakat. Artikel ini secara khusus membahas pengertian dan cakupan teologi politik dalam konteks Indonesia, sebuah negara yang menggabungkan prinsip-prinsip keagamaan dengan ideologi kebangsaan Pancasila. Dalam lanskap Indonesia yang plural secara agama dan budaya, teologi politik berkembang sebagai medan dialektika antara ajaran agama, sistem demokrasi, serta realitas sosial kontemporer. Artikel ini menguraikan bagaimana teologi politik dapat menjadi instrumen reflektif sekaligus kritis terhadap kebijakan publik, distribusi kekuasaan, dan moralitas politik. Dengan menelaah konsep-konsep dasar teologi politik dan mengaitkannya dengan situasi

sosiopolitik Indonesia, tulisan ini bertujuan untuk memperluas pemahaman akademik tentang peran agama dalam kehidupan publik di negara yang majemuk.

Kata Kunci: *Teologi politik, agama dan negara, Pancasila, pluralisme, etika publik, Indonesia*

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Alfina Nur Lutfiah, Dadan Firdaus, Farid Nur Fauzan Naufal, Nisfah Nurfatihah, & Sabda Maulana. (2025). Relasi Agama dan Negara: Kajian Teologi Politik Indonesia. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4b), 2219-2229. <https://doi.org/10.63822/gkbtrx51>

PENDAHULUAN

Interaksi antara agama dan pemerintahan di Indonesia merupakan suatu isu yang sudah lama ada dan terus diperdebatkan sejalan dengan perubahan dalam aspek sosial, politik, dan budaya masyarakat. Sebagai sebuah bangsa yang berlandaskan Pancasila, Indonesia mengedepankan prinsip ketuhanan yang berbasis budaya dan juga menghargai berbagai kepercayaan serta pandangan hidup yang dianut oleh warganya. Dalam konteks ini, muncul apa yang disebut sebagai teologi politik, yaitu pendekatan untuk memahami peranan agama, khususnya dari sudut pandang teologis, dalam diskusi dan praktik politik negara.

Teologi politik tidak sekadar membahas tentang keabsahan kekuasaan melalui lensa agama, tetapi juga mencerminkan bagaimana nilai-nilai yang lebih tinggi, seperti keadilan, moralitas, dan etika publik, menjadi bagian dari narasi kebangsaan. Di Indonesia, teologi politik melibatkan penggabungan antara keinginan religius dan kenyataan pluralisme, yang mendorong negara dan masyarakat untuk terus berdialog mengenai batasan dan bentuk hubungan antara agama dan pemerintahan.

Pancasila sebagai landasan negara berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip-prinsip nasionalisme. Di sinilah pentingnya konsep pluralisme: bagaimana pemerintah dapat menjamin kebebasan menjalankan agama tanpa terjerumus dalam sekularisme yang total, sekaligus menghindari dominasi satu interpretasi agama dalam ranah publik. Pada saat yang sama, etika publik yang berakar dari nilai-nilai teologis menjadi esensial untuk menjaga kerukunan sosial dan mengarahkan politik kepada nilai-nilai moral serta kepentingan bersama.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data yang dikaji bersumber dari literatur primer dan sekunder seperti jurnal ilmiah, buku-buku filsafat politik, teologi, dokumen negara, serta pemikiran tokoh-tokoh Islam dan Kristen yang membahas hubungan antara agama dan negara. Analisis dilakukan secara hermeneutik, yaitu dengan menafsirkan teks-teks teologis dan politik untuk menemukan makna relasi antara konsep-konsep kunci seperti teologi politik, pluralisme, Pancasila, dan etika publik dalam konteks keindonesiaan.

Kerangka analisis juga menggunakan teori konstruksi sosial terhadap agama dan negara, serta pendekatan filsafat politik untuk menilai bagaimana agama mempengaruhi etika publik dan legitimasi kekuasaan. Penelitian ini tidak bermaksud memberikan solusi normatif, tetapi lebih pada memetakan dan merefleksikan akar serta perkembangan konseptual dari teologi politik dalam bingkai pluralisme dan kebangsaan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Teologi Politik (dalam konteks Indonesia)

Teologi politik adalah sebuah bidang kajian yang menyelidiki bagaimana konsep-konsep atau cara berpikir teologis—yakni cara pandang keagamaan tentang hubungan antara Tuhan dan manusia—terhubung dengan dunia politik, masyarakat, dan ekonomi. Dalam cakupan ini, teologi politik tidak sekadar membahas keterlibatan agama dalam politik praktis, melainkan menyentuh lapisan yang lebih dalam: bagaimana pandangan keagamaan merumuskan tatanan kehidupan bersama, bagaimana Tuhan dipahami sebagai pihak yang juga terlibat dalam urusan publik, dan bagaimana struktur kekuasaan seharusnya mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dengan kata lain, teologi politik berusaha menjawab pertanyaan-

pertanyaan mendasar seperti, “Bagaimana Tuhan menghendaki kita hidup sebagai komunitas?” atau “Apa tujuan Tuhan bagi negara dan pemerintahan?”

Meskipun diskursus mengenai hubungan agama dan politik telah berlangsung sejak masa-masa awal sejarah peradaban, termasuk dalam konteks agama Kristen sejak zaman Yesus, teologi politik baru diakui sebagai cabang studi akademik secara luas pada abad ke-20. Di Barat, kemunculan teologi politik ditandai oleh kegelisahan intelektual terhadap bangkitnya rezim totalitarian, kehancuran akibat perang dunia, serta kekosongan moral dalam sistem politik sekuler modern. Tokoh-tokoh seperti Carl Schmitt di Jerman atau Jürgen Moltmann kemudian menempatkan iman dan teologi sebagai landasan untuk mengkritisi dan menafsir ulang kehidupan politik modern.

Namun konteks Indonesia memberi dimensi yang berbeda. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tetapi bukan negara Islam secara formal, Indonesia memosisikan agama sebagai fondasi etis dan kultural dalam kehidupan berbangsa, tanpa menjadikannya dasar tunggal dalam hukum negara. Pancasila, sebagai ideologi resmi negara, secara eksplisit mengakui keberadaan Tuhan dalam sila pertama, namun juga menekankan pentingnya kemanusiaan, demokrasi, persatuan, dan keadilan sosial. Relasi antara nilai-nilai keagamaan dan tatanan politik di Indonesia tidak bersifat dikotomis, melainkan saling berkelindan dalam konfigurasi yang unik. Dalam ruang inilah, teologi politik menjadi alat penting untuk memahami, menafsirkan, bahkan mengkritik dinamika kenegaraan dari perspektif keagamaan.

Teologi politik dalam konteks Indonesia melibatkan perdebatan dan refleksi atas banyak hal: bagaimana Islam memandang negara modern, apakah hukum agama harus menjadi dasar sistem hukum nasional, bagaimana posisi ulama atau tokoh agama dalam proses legislasi dan pemerintahan, hingga bagaimana Islam berinteraksi dengan pluralitas agama dan budaya. Wacana ini bukan sesuatu yang statis. Sejak masa kolonial hingga reformasi, narasi teologi politik di Indonesia terus mengalami pembaruan, baik melalui pemikiran para intelektual Muslim lokal maupun pengaruh arus pemikiran dari dunia Islam global. Di titik ini, teologi politik Indonesia menjadi ruang dialektika antara aspirasi keislaman, realitas sosiopolitik lokal, dan komitmen pada prinsip-prinsip kebangsaan.

Selain menjadi kerangka berpikir normatif, teologi politik juga memainkan peran sebagai alat kritik sosial. Melalui perspektif teologis, berbagai ketimpangan sosial, praktik kekuasaan yang represif, dan kecenderungan materialisme politik dapat dipertanyakan secara moral. Dalam pengalaman Indonesia, suara-suara keagamaan yang menyuarkan keadilan sosial, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta penegakan etika publik, merupakan cerminan dari fungsi teologi politik sebagai kekuatan etis yang hidup. Namun pada saat yang sama, sejarah juga mencatat bagaimana simbol-simbol keagamaan dapat digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan atau bahkan sebagai pembenaran untuk kekerasan dan eksklusi sosial.

Pemahaman tentang teologi politik di Indonesia juga tak bisa dilepaskan dari apa yang disebut “agama sipil”—yaitu praktik simbolik dan naratif keagamaan yang digunakan dalam ruang publik untuk membentuk identitas kolektif. Doa lintas agama dalam acara kenegaraan, penggunaan istilah religius dalam kampanye politik, atau seruan moral dalam debat kebijakan publik menunjukkan bahwa agama tidak pernah benar-benar terpisah dari wacana politik. Tetapi keterlibatan ini, jika tidak disertai dengan kedewasaan teologis, justru berisiko menjadi instrumen politisasi agama, alih-alih menjadikannya sumber pencerahan moral.

Dengan melihat keseluruhan lanskap ini, dapat dikatakan bahwa teologi politik dalam konteks Indonesia adalah medan yang kompleks, cair, dan terus berkembang. Ia bukan sekadar teori abstrak, melainkan cermin dari realitas kehidupan beragama dalam negara yang plural dan demokratis. Pembacaan

terhadapnya membutuhkan kepekaan terhadap sejarah, pemahaman atas kekuatan simbolik agama, serta kesadaran akan dampaknya dalam kehidupan sosial dan kebijakan publik.

2. Konsep Teologi Politik Islam di Indonesia

Konsep teologi politik Islam di Indonesia merupakan hasil konstruksi historis yang kompleks, dinamis, dan kontekstual¹. Sejak masa kerajaan Islam Nusantara hingga era negara bangsa modern, hubungan antara agama dan kekuasaan telah mengalami transformasi yang signifikan. Pada masa awal Islamisasi Nusantara, legitimasi kekuasaan banyak didasarkan pada otoritas keagamaan. Raja atau sultan dianggap sebagai representasi kekuasaan Ilahi di bumi, sehingga pemerintahan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sakral. Model ini terlihat pada sistem Kesultanan Aceh, Demak, Ternate, dan lainnya, di mana hukum Islam dijadikan dasar legitimasi sosial-politik. Namun, sejak Indonesia merdeka dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, legitimasi kekuasaan bergeser dari bentuk sakral ke bentuk konstitusional. Kedaulatan beralih ke tangan rakyat melalui sistem demokrasi³. Dalam konteks ini, dua organisasi Islam terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, berperan penting dalam membentuk wajah Islam Indonesia. Meskipun memiliki karakteristik ideologis dan metodologis yang berbeda, keduanya memilih sikap akomodatif terhadap negara bangsa dan ideologi Pancasila. NU lebih menekankan pendekatan tradisional-kultural berbasis pesantren yang melahirkan konsep Islam Nusantara, sementara Muhammadiyah mengedepankan pendekatan modern-intelektual yang dikembangkan melalui gagasan Islam Berkemajuan. Keduanya tidak hanya mendukung NKRI, tetapi juga aktif mengisi ruang publik dengan nilai-nilai Islam yang inklusif dan progresif.

Sikap akomodatif ini diuji oleh munculnya kembali gagasan khilafah yang dibawa oleh organisasi transnasional seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang menolak demokrasi dan Pancasila. HTI mengusung konsep imamah universal dan sistem khilafah Islam sebagai satu-satunya model pemerintahan ideal bagi umat Islam, serta menganggap sistem negara-bangsa sebagai bentuk taghut (non-Islami). Wacana ini mendapat penolakan luas dari NU dan Muhammadiyah yang melihat ide tersebut tidak relevan dalam konteks keindonesiaan yang majemuk. Imam Ghazali mencatat bahwa kedua ormas ini secara ideologis maupun strategis menolak gagasan khilafah yang dianggap bertentangan dengan asas kebangsaan. Respon negara terhadap HTI juga sangat tegas, dibuktikan dengan pembubaran organisasinya pada 2017. NU dan Muhammadiyah mendukung keputusan ini karena dipandang sebagai langkah penting dalam menjaga stabilitas nasional dan integrasi ideologi Pancasila. Dalam pandangan Bakri, penolakan terhadap HTI tidak hanya dalam bentuk pembelaan negara, tetapi juga melalui kerja-kerja dakwah dan pendidikan yang dilakukan NU di level akar rumput untuk membendung ideologi transnasional tersebut. Meski demikian, diskursus teologi politik tidak hanya berlangsung di antara negara dan ormas-ormas Islam, tetapi juga terjadi dalam tubuh internal NU dan Muhammadiyah sendiri. Mutawalli mencatat adanya ketegangan antara kelompok yang lebih normatif-skripturalis dan mereka yang cenderung kontekstualis dalam membaca relasi Islam dan politik. Perdebatan ini memunculkan dinamika dalam strategi dakwah dan posisi ormas terhadap negara dan kekuasaan.

Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Hasyim Ashari, Mustafa, dan Latief memperlihatkan adanya perubahan arah wacana dari bentuk sistemik ke arah etika profetik. Mereka menyebut bahwa politik kenabian bukanlah bentuk pemerintahan struktural seperti khilafah atau imamah, tetapi lebih sebagai panduan moral bagi para pemimpin dan umat Islam dalam menjalankan kekuasaan. Konsep ini mengarah pada penguatan moralitas publik seperti keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab sosial, bukan dominasi atas struktur politik formal negara. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa teologi

politik Islam di Indonesia bergerak dalam jalur yang khas. Ia tidak memilih jalur konfrontatif terhadap negara modern, tetapi membangun sintesis antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kebangsaan. Islam di Indonesia hadir bukan sebagai negara Islam formal, melainkan sebagai kekuatan moral, budaya, dan sosial yang aktif memberi warna pada sistem kenegaraan modern. Dengan demikian, pendekatan Islam dalam politik Indonesia lebih menekankan pada substansi nilai (seperti keadilan, kemaslahatan, dan moderasi) dibanding formalisasi sistem pemerintahan agama seperti khilafah atau imamah.

3. Tokoh-Tokoh dan Mazhab Teologi Politik di Indonesia

Muhammad Natsir adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam dan politik Indonesia. Ia dikenal sebagai cendekiawan Muslim sekaligus tokoh politik yang mendirikan partai Masyumi dan pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Pemikirannya tentang Islam sangat menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem kenegaraan tanpa harus mendirikan negara agama. Ia mengajukan konsep integrasi antara Islam dan negara dalam bentuk negara nasional yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Moch. Wasil (2022) berjudul “Perbandingan Pemikiran Politik Islam Muhammad Natsir dengan Habib Muhammad Rizieq Shihab”, dijelaskan bahwa Natsir mengedepankan pendekatan demokratis dalam menyampaikan aspirasi Islam politik, dengan penekanan pada keutuhan NKRI dan semangat dakwah yang rasional. Pemikirannya ini menunjukkan bahwa Islam bisa berjalan berdampingan dengan demokrasi dan kebangsaan Indonesia tanpa harus menjadi negara Islam secara formal.

KH. Hasyim Asy’ari merupakan tokoh ulama kharismatik dan pendiri Nahdlatul Ulama yang perannya sangat besar dalam perkembangan Islam tradisional di Indonesia. Beliau menekankan pentingnya pemahaman Islam yang moderat, toleran, dan sejalan dengan budaya lokal. Melalui pemikirannya dalam kitab Risalah Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah, Hasyim Asy’ari menegaskan pentingnya menjaga akidah Ahlussunnah wal Jama’ah dan menjunjung tinggi persatuan umat dalam bingkai kebangsaan. Dalam jurnal yang ditulis oleh Umma Farida (2020) berjudul “Kontribusi dan Peran KH. Hasyim Asy’ari dalam Membingkai Moderasi Beragama Melalui Pemikiran Risalah Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah”, dijelaskan bahwa Hasyim Asy’ari mengembangkan prinsip wasathiyah (moderasi) dalam beragama yang sangat relevan dengan konteks keindonesiaan yang majemuk. Pemikirannya ini memberikan dasar bagi konsep Islam Nusantara yang memadukan ajaran Islam dengan kearifan lokal.

Tokoh berikutnya adalah M. Quraish Shihab, seorang mufasir kontemporer yang dikenal luas melalui karya-karya tafsirnya seperti Tafsir al-Mishbah dan Wawasan Al-Qur’an. Quraish Shihab dikenal karena pendekatannya yang kontekstual, tematik, dan rasional dalam memahami Al-Qur’an, serta pandangan keagamaannya yang moderat. Ia sering menekankan bahwa nilai-nilai Islam harus dihayati secara substansial dan tidak sekadar formalistik. Dalam jurnal yang ditulis oleh Agus Mukmin (2022) berjudul “Konsep Nasionalisme M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah”, dijelaskan bahwa nasionalisme dalam pandangan Quraish Shihab tidak bertentangan dengan Islam, justru sejalan dengan nilai persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Pemikiran Quraish Shihab juga dibahas dalam tulisan Muhammad Rusdi (2023) dalam jurnal *Politica*, yang menyoroti bagaimana etika Qur’ani dijadikan landasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Quraish Shihab menolak bentuk negara Islam yang teokratis, namun mendukung nilai-nilai ilahiah dihadirkan dalam ruang publik melalui etika dan moralitas.

Habib Rizieq Shihab merupakan tokoh yang lebih dikenal melalui aktivitas gerakan dan retorika publiknya sebagai pendiri Front Pembela Islam (FPI). Ia secara terbuka memperjuangkan penerapan syariat Islam dalam hukum nasional dan pernah mendorong pengesahan Piagam Jakarta sebagai bagian dari

konstitusi. Pendekatannya terhadap dakwah dan perjuangan Islam cenderung bersifat konfrontatif dan langsung, berbeda dengan pendekatan intelektual tokoh-tokoh sebelumnya. Dalam wawancaranya yang dimuat dalam jurnal Tashwirul Afkar edisi 13 tahun 2002, berjudul “Jika Syariat Islam Jalan, Maka Jadi Negara Islam”, Rizieq menegaskan bahwa Islam adalah sistem sempurna yang harus menjadi dasar hukum negara. Selain itu, dalam skripsi Moch. Wasil (2022), pemikiran Rizieq dibandingkan dengan Natsir. Rizieq dianggap lebih radikal dalam menegaskan pentingnya formalisasi syariat, meski tetap menyatakan setia pada negara.

Dengan demikian, keempat tokoh ini mewakili beragam spektrum pemikiran Islam di Indonesia: dari pemikiran integratif dan demokratis (Natsir), Islam tradisional yang moderat (Hasyim Asy’ari), tafsir kontekstual modern (Quraish Shihab), hingga Islam politik yang tegas dan konfrontatif (Habib Rizieq). Keempatnya menunjukkan bahwa pemikiran Islam di Indonesia berkembang dengan sangat dinamis dan beragam, sesuai dengan konteks sosial-politik dan latar belakang keilmuan masing-masing.

Pemikiran Abul A’la Maududi memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dakwah sistematis dan ideologi politik Islam yang berkembang di Indonesia, khususnya melalui gerakan tarbiyah yang kemudian melahirkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pemikiran Maududi tidak hanya menawarkan sebuah konsep Islam sebagai sistem hidup (*nizham al-hayat*), tetapi juga menyusun strategi pembinaan kader dalam bentuk yang terstruktur dan berorientasi jangka panjang. Strategi ini kemudian diadopsi dan dimodifikasi oleh gerakan tarbiyah di Indonesia dalam bentuk kegiatan *liqo* atau *halaqah*. Ahmad Ali Nurdin (2024) menegaskan bahwa gerakan tarbiyah Indonesia secara langsung merupakan perluasan dari gerakan yang dipromosikan oleh Maududi. Dalam kajiannya, ia menyatakan:

“The emergence of what was known in Indonesia as the dakwah or tarbiyah movement ... was in fact an extension of the movements promoted by Abu A’la Maududi ... For the PKS, books written by Maududi ... have become main sources for its members’ training activity, known as the *liqo* activity” (Nurdin, 2024, p. 27).

Kutipan ini memperlihatkan bahwa buku-buku Maududi menjadi bahan ajar utama dalam kegiatan *liqo*, yaitu pertemuan kecil mingguan yang dilakukan secara rutin. Dalam kegiatan tersebut, seorang murabbi (pembimbing spiritual dan ideologis) membimbing beberapa mutarabbi (anak bina) melalui kurikulum pembelajaran terstruktur, yang mencakup pemahaman dasar Islam, akhlak, manhaj (metodologi dakwah), serta isu-isu sosial-politik kontemporer dari perspektif Islam. Proses ini membentuk jaringan kaderisasi yang kuat, hierarkis, dan berbasis loyalitas ideologis. Struktur kaderisasi ini mencerminkan sistem kepemimpinan berjenjang dan kolektif sebagaimana dirumuskan Maududi dalam gerakan Jamaat-e-Islami di Pakistan. Melalui pendekatan ini, terbentuk pula mekanisme reproduksi kepemimpinan ideologis dalam tubuh gerakan, yang memungkinkan konsistensi dakwah dan pengaruh politik di berbagai level masyarakat, khususnya di kalangan kampus dan generasi muda muslim.

Lebih lanjut, Ai Fatimah Nur Fuad (2021) menjelaskan bahwa gerakan tarbiyah bukanlah fenomena instan, melainkan hasil dari adaptasi strategi dakwah alternatif yang berkembang sejak masa Orde Baru. Di tengah represi negara terhadap gerakan Islam politik kala itu, tarbiyah justru tumbuh subur melalui ruang-ruang privat dan komunitas kampus. Dengan memanfaatkan peluang demokratisasi pasca-Reformasi 1998, gerakan ini kemudian bertransformasi menjadi partai politik formal—Partai Keadilan (1998), yang kemudian berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (2002). Fuad menyatakan:

“Gerakan tarbiyah adalah bentuk dakwah sistematis yang lahir sebagai respons terhadap represi politik Islam, lalu bermetamorfosis menjadi kekuatan politik formal dengan modal sosial dan ideologis yang kuat di era reformasi” (Fuad, 2021, hlm. 15).

Transformasi ini menunjukkan keberhasilan transfer ide Maududi dari ranah dakwah ke ranah politik formal, yang tidak hanya mengusung nilai-nilai Islam dalam kehidupan individu, tetapi juga dalam sistem kelembagaan dan kebijakan negara. Dengan demikian, pengaruh pemikiran Maududi di Indonesia tidak hanya bersifat teoritis, tetapi nyata dalam praktik dakwah, sistem kaderisasi, hingga strategi politik yang diterapkan oleh kelompok Islam kontemporer seperti PKS. Ide tentang supremasi hukum Tuhan (hakimiyyah), masyarakat Islami, dan pentingnya struktur organisasi dakwah menjadi pijakan filosofis yang terus direplikasi dalam konteks lokal Indonesia hingga kini.

Pemikiran Sayyid Qutb, terutama yang tertuang dalam karyanya *Fī Zhilāl al-Qur’ān*, memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan struktur ideologis dan strategi dakwah Gerakan Tarbiyah di Indonesia. Salah satu konsep kunci dalam pemikiran Qutb adalah “jamaah”, yang dipahami bukan hanya sebagai komunitas religius, melainkan sebagai institusi sosial-politik yang terorganisir secara struktural dan ideologis.

Toto Santi Aji dan Ahmad Yusron (2022) menekankan bahwa pemahaman Qutb tentang jamaah sangat berbeda dari pengertian tradisional. Jamaah bagi Qutb adalah sebuah sistem kehidupan kolektif yang terikat dalam loyalitas ideologis dan soliditas struktural. Dalam analisis mereka disebutkan:

“They conclude that jamaah is not merely a religious community but also a socio-political institution that binds its members in structural solidarity and organizational loyalty” (Aji & Yusron, 2022, p. 25).

Model ini kemudian diadopsi oleh Gerakan Tarbiyah di Indonesia dalam bentuk halaqah atau liqo’ — yaitu pertemuan rutin mingguan yang membentuk cell-based organization, sebagaimana diwariskan dari pola kaderisasi usrah dalam tradisi Ikhwanul Muslimin Mesir. Dalam pola ini, setiap anggota (mutarabbi) dibimbing oleh seorang murabbi (pembina) dalam unit kecil yang terstruktur berdasarkan tingkat keterlibatan seperti tamhidi, muayyid, muntabiq, hingga naqib.

Struktur halaqah ini memfasilitasi transmisi ideologi Islamisme modern dan mendorong terbentuknya generasi kader dakwah yang disiplin, loyal, dan siap untuk mengambil peran sosial-politik. Sebagaimana dicatat oleh Nurdin (2024), struktur ini menjadi tulang punggung pengkaderan Partai Keadilan Sejahtera (PKS):

“For the PKS, books written by Maududi ... have become main sources for its members’ training activity, known as the liqo activity” (Nurdin, 2024, p. 27).

Meskipun kutipan ini merujuk pada pengaruh Maududi, struktur kaderisasi yang sama juga ditemukan dalam gerakan tarbiyah yang terinspirasi oleh Qutb. Melalui halaqah, doktrin Qutb tentang hakimiyyah (kedaulatan Tuhan), jahiliyyah modern (masyarakat non-Islami), dan pentingnya transformasi sosial oleh kelompok pionir (thali’ah) ditanamkan secara sistematis.

Konsep jahiliyyah modern, sebagai salah satu gagasan utama Qutb, juga menjadi inspirasi penting bagi aktivisme politik berbasis Islam di Indonesia. Dalam pandangan Qutb, masyarakat modern yang tidak menjalankan hukum Tuhan adalah masyarakat jahiliyah. Pandangan ini menjadi dasar penolakan terhadap sistem sekuler dan menjadi kritik ideologis terhadap pemerintahan modern yang dianggap tidak Islami.

“According to him, jahiliyyah is not merely a period in the past but a condition that occurs now... These two societies cannot be gathered in one society. [...] Therefore, jihad is cosmic necessity” (Resa, 2023, hlm. 180).

Pemikiran ini mendorong munculnya kesadaran kolektif dalam gerakan tarbiyah bahwa mereka adalah bagian dari “jamaah dakwah” yang bertugas mengislamisasi masyarakat secara menyeluruh melalui dakwah dan kekuasaan. Strategi ini pada akhirnya membentuk PKS sebagai wadah politik formal yang berakar dari aktivitas halaqah dan tarbiyah kampus, sebagaimana diuraikan oleh Fuad (2021).

Menurut Ai Fatimah Nur Fuad (2021), Gerakan Tarbiyah muncul sebagai respons terhadap represi politik Islam pada masa Orde Baru dan kemudian memanfaatkan peluang demokratisasi pasca-1998 untuk masuk ke ranah politik formal:

“Gerakan tarbiyah adalah bentuk dakwah sistematis yang lahir sebagai respons terhadap represi politik Islam, lalu bermetamorfosis menjadi kekuatan politik formal dengan modal sosial dan ideologis yang kuat di era reformasi” (Fuad, 2021, hlm. 15).

Secara keseluruhan, pemikiran Qutb telah meninggalkan warisan yang sangat berpengaruh dalam format ideologis dan operasional gerakan Islam politik di Indonesia. Konsep jamaah, jahiliyyah, dan strategi perubahan melalui kaderisasi struktural telah menjadi ciri khas yang terus membentuk arah gerakan Islam kontemporer.

Islam Moderat, Konservatif, Radikal, Islam moderat di Indonesia berpijak pada semangat wasathiyah (keseimbangan), menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan komitmen terhadap demokrasi. Kelompok ini tidak menolak syariat Islam, tetapi memilih menafsirkannya dalam konteks kebangsaan dan keindonesiaan. Organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menjadi representasi utama dari arus ini. Menurut Firman Noor (2016), kelompok moderat memandang bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan seiring, sepanjang dimaknai secara kontekstual dan inklusif terhadap keragaman sosial-budaya Indonesia. Ia menyebut: “Radikal Islam ingin Islam diterapkan secara kaffah tanpa kompromi, sementara Islam moderat lebih terbuka terhadap pluralitas dan nilai demokrasi” (Noor, 2016, p. 20). Amin Maghfuri (2019) juga menekankan bahwa pendidikan menjadi arena penting dalam menumbuhkan pemahaman Islam moderat. Ia menyatakan: “Educational institutions can mainstream moderate Islam through curriculum and policy, countering the rise of conservative understanding in Islam” (Maghfuri, 2019, p. 4). Moderasi Islam juga tercermin dalam gagasan Islam Nusantara yang berupaya memadukan nilai-nilai lokal dengan universalitas Islam, serta dalam respons keagamaan NU dan Muhammadiyah terhadap radikalisme dan Islam politik transnasional (Hakim, 2023).

Kelompok konservatif memiliki kecenderungan untuk memaknai Islam secara tekstual, dan cenderung menolak pendekatan kontekstual terhadap tafsir agama. Mereka umumnya menolak pluralisme agama, liberalisme, dan demokrasi sekuler, serta mendukung penerapan syariah secara ketat. Azra (2017) menyebut bahwa Islam konservatif di Indonesia sedang mengalami pertumbuhan yang signifikan dan bahkan mulai memberi tekanan terhadap sistem demokrasi. Konservatisme ini sering tampak dalam sikap eksklusif, penggunaan simbol agama dalam politik identitas, serta penolakan terhadap praktik keberagaman. Dalam penelitian Maghfuri (2019), ditemukan bahwa pemahaman konservatif justru menjadi tantangan besar dalam upaya mengarusutamakan Islam moderat di lembaga pendidikan. Ia menjelaskan bahwa: “Conservative understanding often blocks the institutionalization of moderate Islamic values, especially in pesantren and Islamic schools” (Maghfuri, 2019, p. 6).

Spektrum radikal merupakan bentuk paling ekstrem dari konservatisme. Kelompok ini menolak sistem demokrasi, anti terhadap negara nasional, dan mendukung pendirian negara Islam atau khilafah sebagai bentuk puncak dari penerapan Islam kaffah. Mereka percaya bahwa hanya sistem politik Islam yang otentik dapat menyelamatkan umat dari krisis moral dan sosial. Firman Noor (2016) membedakan bahwa Islam radikal menekankan pemurnian total dan kerap menggunakan pendekatan yang konfrontatif. Dalam penelitiannya ia mencatat: “Radical Islamic movements advocate for a revolutionary change and view the current state system as part of a jahiliyyah structure to be overthrown” (Noor, 2016, p. 24). Kelompok-kelompok seperti Jemaah Islamiyah (JI), ISIS, serta simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) merupakan contoh representasi dari spektrum ini. Mereka seringkali menggunakan

narasi keagamaan untuk mendorong mobilisasi politik bahkan kekerasan, sebagaimana juga diuraikan oleh Lukman Hakim (2023).

KESIMPULAN

Pemahaman teologi politik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah serta keberagaman budaya dan agama yang ada di tanah air. Berbeda dengan teologi politik di negara Barat yang biasanya menentang sekularisme, teologi politik di Indonesia tumbuh dalam suasana dialog antara prinsip-prinsip agama dan nasionalisme. Pancasila, sebagai landasan negara, berfungsi sebagai titik temu yang memungkinkan penyatuan nilai-nilai transenden dalam tata pemerintahan tanpa menjadikannya sebagai negara berbasis agama.

Pluralisme menjadi elemen yang sangat penting yang menunjukkan bahwa Indonesia dibangun di atas penerimaan terhadap berbagai keyakinan, dan untuk itu, teologi politik di Indonesia mendorong sikap etis serta terbuka dari para penganut agama. Etika publik menjadi sarana yang memungkinkan nilai-nilai keagamaan berkontribusi dalam pembuatan kebijakan dan pemerintahan, bukannya menjadi alat dominasi. Oleh karena itu, teologi politik dalam konteks Indonesia seharusnya berperan sebagai sumber inspirasi moral, bukan sebagai instrumen ideologis untuk menguasai.

DAFTAR PUSTAKA

- Addieu jb metz(Teologi politik). Indonesia Satu. Diambil 24 Juni 2025, dari <https://indonesiasatu.co/detail/addieu-jb-metz--teologi-politik->
- Agus Mukmin, "Konsep Nasionalisme M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah," *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2022): 82–93.
- Azra, A. (2017). *Islam, Politics and Democracy in Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Bakri, M. "Respon NU terhadap Gempuran Aliran Fundamental dalam Perspektif Politik Islam." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 1 (2021): 66–80. <https://digilib.uinsgd.ac.id/32463/>.
- Fuad, A. F. N. (2021). Strategi politik gerakan tarbiyah dalam pemilu Indonesia pasca Orde Baru. *Jurnal Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 21(1), 1–25. <https://doi.org/10.21154/tahrir.v21i1.2434>
- Ghozali, Imam. "Aliran Pemikiran Politik Islam Indonesia: Muhammadiyah dan NU vs FPI dan HTI." *Al Qalam* 37, no. 1 (2020): 89–104. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v37i1.2724>.
- Hakim, L. (2023). Deradikalisasi pemahaman keagamaan di Indonesia: Mempertimbangkan wacana Islam moderat dan Islam Nusantara. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 25(1), 67–89. <https://doi.org/10.22373/substantia.v25i1.8967>
- Hasyim Ashari, Mustari, Mustafa Mustari, dan Muhaimin Latief. "Diskursus Pemikiran Keagamaan di Indonesia: Studi Kritis Pemikiran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama." *Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf* 11, no. 1 (2025): 79–94. <https://doi.org/10.53429/spiritualis.v11i1.1358> [ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id+4ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id+4](http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id+4ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id+4ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id+4).
- Khamami Zada dan Busman Edyar, "Jika Syariat Islam Jalan, Maka Jadi Negara Islam," *Tashwirul Afkar*, no. 13 (2002).

- Lukman, Dede D. “Respon Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila.” *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 3 (2022): 555–564. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jis/article/view/30823>.
- Maghfuri, A. (2019). Countering conservative-radical understanding by mainstreaming moderate Islam and the role of educational institution in Indonesia. *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.14421/skijier.2019.2019.31.01>
- Mutawalli. “Pergulatan Pemikiran Melawan Arus: Penyempalan dalam Tubuh NU dan Muhammadiyah.” *Ulumuna* 11, no. 2 (2021): 180–195. (Akses via portal resmi Ulumuna atau perpustakaan universitas). . <https://ulumuna.or.id/index.php/ujs/article/view/355>
- Muhammad Rusdi Muhammaddiah, “Etika Qur’ani Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Quraish Shihab,” *Politica: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 14, no. 1 (2023): 13–30.
- Moch. Wasil, Perbandingan Pemikiran Politik Islam Muhammad Natsir dengan Habib Muhammad Rizieq Shihab (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).
- Nasikhin, Raaharjo & Nasikhin (2022). Moderasi Beragama NU dan Muhammadiyah dalam Konsep Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan. *Islamic Review*, 11(1). Menjelaskan wacana moderasi sebagai bentuk teologi politik, menggabungkan idealisme dan kenegaraan <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/371/235>
- Noor, F. (2016). Comparison of the political perceptions between radical Islam and moderate Islam in Indonesia in the Reform Era. *Journal of Political Research*, 2(1), 13–33. <https://doi.org/10.14203/jpp.v2i1.389>
- Nurdin, A. A. (2024). *The influence of Middle Eastern Islamic political thought on Islamic political parties in Indonesia: The case of PKS*. *Global Journal Al-Thaqafah*, 9(2), 27–37. <https://doi.org/10.7187/GJAT122019-3>
- Resa, A. (2023). Konsep jahiliyyah dalam pandangan Sayyid Qutb. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 25(2), 173–187. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v25i2.38185>
- Taneo, R. F. S. (2025). Pancasila sebagai agama sipil? Analisis kritis dalam kerangka teologi publik kristen di indonesia. *Forum*, 54(1), 69–81. <https://doi.org/10.35312/forum.v54i1.727>
- The art of political theology—Finding the right definition and the proper set of questions(Jonathan cole). (2017, Maret 9). Political Theology Network. <https://politicaltheology.com/the-art-of-political-theology-finding-the-right-definition-and-the-proper-set-of-questions-jonathan-cole/>
- Umma Farida, “Kontribusi dan Peran KH. Hasyim Asy’ari dalam Membingkai Moderasi Beragama Melalui Pemikiran Risalah Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah,” *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 8, no. 2 (2020): 171–188.
- Zhilâl Al-Qur’ân. Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 6(1), 19–38. <https://doi.org/10.21009/hayula.006.01.02>